

EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER INDONESIA

Tantangan Stabilitas



Stabilitas nasional bukan sekadar absennya krisis, melainkan kemampuan ekonomi, politik, dan institusi Indonesia untuk menyerap guncangan tanpa kehilangan arah pembangunan, legitimasi publik, dan kepercayaan pasar.



1 Potret Singkat Indonesia 2025–2026



2 Mengapa Stabilitas Penting?

- Menjaga daya beli masyarakat
- Memelihara kepercayaan investor dan pasar
- Menopang legitimasi pemerintah
- Menjamin kelangsungan transformasi menuju Indonesia Maju 2045

3 Tantangan Utama Stabilitas

- 1 Tekanan terhadap rupiah dan volatilitas global
- 2 Inflasi pangan dan energi
- 3 Ruang fiskal yang terbatas di tengah belanja prioritas
- 4 Ketergantungan pada impor energi dan defisit migas
- 5 Kualitas pekerjaan dan dominasi sektor informal
- 6 Ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial
- 7 Tata kelola, korupsi, dan kepastian hukum
- 8 Polarisasi, disinformasi, dan sensitivitas demokrasi

4 Interaksi Ekonomi–Politik



5 Arah Kebijakan yang Dibutuhkan

- Menjaga disiplin fiskal dan kualitas belanja
- Memperkuat stabilitas moneter dan nilai tukar
- Mendorong investasi produktif dan hilirisasi bernilai tambah
- Menciptakan pekerjaan berkualitas dan memperkuat SDM
- Memperbaiki tata kelola, transparansi, dan pemberantasan korupsi
- Memelihara ruang demokrasi, dialog publik, dan kohesi sosial

Pesan Kunci

Indonesia masih cukup tangguh, tetapi stabilitas ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, tata kelola yang kredibel, dan demokrasi yang sehat.

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Sumber data ringkas: BPS, Bank Indonesia, 2025–2026.

*Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi dan Politik Kontemporer Indonesia:
Tantangan Stabilitas*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

31 May 2026

EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER INDONESIA: TANTANGAN STABILITAS

Abstrak

Indonesia memasuki periode ekonomi-politik kontemporer yang kompleks: pertumbuhan ekonomi tetap berada di sekitar 5 persen, inflasi relatif terkendali, kemiskinan dan pengangguran menunjukkan perbaikan, tetapi tekanan terhadap stabilitas semakin multidimensional. Pada satu sisi, Indonesia masih memiliki modal besar berupa pasar domestik luas, struktur demografis produktif, cadangan devisa yang relatif memadai, surplus perdagangan nonmigas, serta ambisi transformasi menuju negara berpendapatan tinggi. Pada sisi lain, stabilitas menghadapi tekanan dari pelemahan rupiah, ketidakpastian global, harga energi, defisit transaksi berjalan, tekanan fiskal, tuntutan belanja sosial besar, ketimpangan wilayah, kualitas pekerjaan, tata kelola, korupsi, konflik sosial, dan sensitivitas demokrasi. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan tumbuh 5,61 persen year-on-year pada Triwulan I 2026; sementara BI pada Mei 2026 menaikkan BI-Rate menjadi 5,25 persen untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menjaga inflasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini menempatkan stabilitas bukan sekadar absennya krisis, melainkan kapasitas sistem ekonomi-politik untuk menyerap guncangan tanpa kehilangan legitimasi, efektivitas, dan arah pembangunan jangka panjang. Tantangan utama Indonesia bukan hanya mempertahankan angka

pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut produktif, inklusif, dipercaya pasar, diterima masyarakat, dan ditopang institusi yang kredibel.

Kata kunci: stabilitas ekonomi, stabilitas politik, Indonesia kontemporer, rupiah, fiskal, demokrasi, tata kelola, pertumbuhan inklusif, ketahanan nasional.

1. Pendahuluan: Mengapa Stabilitas Menjadi Isu Sentral?

Dalam diskursus ekonomi-politik, stabilitas sering dipahami secara sempit sebagai keadaan tanpa krisis: harga tidak melonjak, kurs tidak runtuh, anggaran tidak jebol, demonstrasi tidak meluas, dan pemerintahan berjalan. Namun dalam konteks Indonesia kontemporer, pengertian seperti itu terlalu minimal. Stabilitas sejati harus dilihat sebagai kemampuan negara, pasar, dan masyarakat untuk tetap berfungsi secara produktif ketika menghadapi tekanan global, perubahan teknologi, tuntutan sosial, dan kompetisi geopolitik.

Indonesia hari ini berada pada persimpangan penting. Di satu sisi, negara ini memiliki basis ekonomi yang relatif kuat. Produk domestik bruto tetap tumbuh positif, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyangga utama, investasi terus didorong, perdagangan luar negeri masih mencatat surplus, dan inflasi selama beberapa tahun terakhir cenderung berada dalam rentang sasaran kebijakan. IMF menilai ekonomi Indonesia tetap resilien di tengah lingkungan eksternal yang menantang, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5,1 persen pada 2026 dan inflasi menuju titik tengah sasaran. ([IMF](#))

Di sisi lain, stabilitas tidak bisa dilepaskan dari kualitas kepercayaan. Kepercayaan investor bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal, independensi bank sentral, kepastian hukum, dan tata kelola. Kepercayaan masyarakat bergantung pada rasa keadilan, keterjangkauan harga pangan, lapangan kerja layak, pelayanan publik, kebebasan sipil, dan persepsi bahwa negara dikelola untuk kepentingan publik. Karena itu, ekonomi dan

politik tidak dapat dipisahkan. Kebijakan ekonomi yang secara teknis rasional dapat menjadi tidak stabil bila dianggap tidak adil. Sebaliknya, kebijakan politik yang populer dapat membebani stabilitas makro bila tidak disertai kapasitas fiskal dan kelembagaan.

Tema “tantangan stabilitas” menjadi semakin relevan karena Indonesia sedang mengejar ambisi besar: keluar dari jebakan pendapatan menengah, mencapai pertumbuhan lebih tinggi, memperkuat hilirisasi, memperluas perlindungan sosial, membangun kapasitas pangan dan energi, serta masuk ke jajaran negara maju pada 2045. World Bank mencatat bahwa pemerintah Indonesia memiliki aspirasi mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045 dan menargetkan pertumbuhan tahunan yang jauh lebih tinggi menuju 2029. ([World Bank](#))

Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanpa stabilitas kelembagaan sering rapuh. Demikian pula stabilitas tanpa transformasi dapat berubah menjadi stagnasi. Indonesia membutuhkan stabilitas yang dinamis: cukup tertib untuk menjaga kepercayaan, tetapi cukup adaptif untuk melakukan reformasi struktural.

2. Kerangka Konseptual: Ekonomi-Politik Stabilitas

Ekonomi-politik melihat bahwa kebijakan ekonomi tidak lahir di ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, institusi, distribusi sumber daya, koalisi politik, dan tekanan masyarakat. Dalam pendekatan ini, stabilitas memiliki sedikitnya lima dimensi.

Pertama, **stabilitas makroekonomi**, yakni kemampuan negara menjaga inflasi, kurs, defisit fiskal, utang, neraca pembayaran, dan sistem keuangan agar tetap terkendali. Kenaikan BI-Rate pada Mei 2026 memperlihatkan bahwa stabilitas rupiah menjadi prioritas penting ketika tekanan eksternal dan domestik meningkat. ([Bank Indonesia](#))

Kedua, **stabilitas fiskal**, yaitu kemampuan APBN membiayai prioritas pembangunan tanpa menimbulkan persepsi risiko utang, defisit, atau pembiayaan yang tidak sehat. APBN 2026 disusun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB, masih di bawah batas 3 persen, tetapi tetap mendapat perhatian karena belanja prioritas pemerintah meningkat.

([InvestorTrust](#))

Ketiga, **stabilitas sosial**, yaitu kemampuan negara menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan, memperluas pekerjaan, dan merawat kohesi sosial. BPS mencatat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen pada September 2025, sementara tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 berada pada 4,68 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Keempat, **stabilitas politik-demokratis**, yaitu kemampuan sistem politik menyerap aspirasi, kritik, pergantian kepemimpinan, dan konflik kepentingan tanpa represi berlebihan atau erosi legitimasi. Freedom House menilai Indonesia telah mencatat kemajuan demokratis sejak 1998, tetapi masih menghadapi tantangan berupa korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik Papua, serta penggunaan pasal defamasi dan penodaan agama secara politis. ([Freedom House](#))

Kelima, **stabilitas kelembagaan**, yakni kualitas aturan main, kepastian hukum, akuntabilitas, koordinasi antar-lembaga, dan kepercayaan terhadap institusi. Presiden Prabowo sendiri pernah menegaskan bahwa Indonesia menghadapi persoalan good governance, korupsi, dan lemahnya kinerja institusi; pernyataan ini penting karena stabilitas jangka panjang membutuhkan reformasi kelembagaan, bukan hanya stimulus ekonomi. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Dengan demikian, stabilitas kontemporer Indonesia harus dibaca sebagai interaksi antara angka makro, legitimasi sosial, dan kredibilitas institusi. Rupiah dapat dijaga melalui suku bunga, tetapi kepercayaan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap fiskal, tata kelola, dan independensi kebijakan. Kemiskinan dapat turun, tetapi stabilitas sosial tetap rapuh bila biaya hidup, kualitas pekerjaan, dan kesenjangan wilayah

tidak tertangani. Pemerintah dapat kuat secara politik, tetapi stabilitas demokratis dapat melemah jika kritik publik tidak dikelola sebagai masukan, melainkan sebagai ancaman.

3. Kondisi Makroekonomi Terkini: Resiliensi dengan Tekanan Baru

Secara agregat, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi dari 5,03 persen pada 2024; pada Triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,61 persen secara year-on-year, meskipun berkontraksi 0,77 persen secara quarter-to-quarter. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertumbuhan sekitar 5 persen memiliki dua wajah. Di satu sisi, angka ini relatif baik dibanding banyak negara berkembang yang menghadapi tekanan geopolitik, suku bunga global, dan perlambatan perdagangan dunia. Di sisi lain, angka tersebut belum cukup untuk mempercepat lompatan menuju negara maju bila tidak disertai peningkatan produktivitas, investasi bernilai tambah tinggi, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. World Bank menekankan bahwa Indonesia perlu memperbaiki iklim usaha, stabilitas regulasi, produktivitas, dan kualitas pekerjaan untuk membuka pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih inklusif. ([Open Knowledge Repository](#))

ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen pada 2026 dan 2027, dengan inflasi diperkirakan 2,5 persen pada periode yang sama. Proyeksi ini menggambarkan skenario pertumbuhan moderat: cukup stabil, tetapi belum melonjak ke tingkat 7–8 persen. ([Asian Development Bank](#))

Salah satu penyangga utama adalah konsumsi domestik. Struktur ekonomi Indonesia yang memiliki pasar besar membuat permintaan internal berperan sebagai bantalan ketika ekspor melemah. Namun konsumsi domestik juga bergantung pada daya beli masyarakat. Bila inflasi pangan, energi, transportasi, dan biaya perumahan meningkat, rumah tangga

menengah-bawah akan menahan belanja, sehingga efeknya kembali ke pertumbuhan.

Sektor eksternal masih menunjukkan kekuatan, tetapi tidak tanpa risiko. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2025 surplus US\$41,05 miliar, ditopang surplus nonmigas sebesar US\$60,75 miliar, sementara sektor migas masih defisit US\$19,70 miliar. Pada Januari–Maret 2026, neraca perdagangan masih surplus US\$5,55 miliar, dengan surplus nonmigas US\$10,63 miliar dan defisit migas US\$5,08 miliar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data ini menunjukkan pola klasik Indonesia: kuat pada komoditas dan nonmigas tertentu, tetapi rentan terhadap impor energi. Ketika harga minyak dunia naik, tekanan terhadap neraca migas, subsidi, inflasi, dan kurs dapat meningkat. Ini memperlihatkan bahwa stabilitas energi bukan hanya isu teknis, tetapi bagian inti dari stabilitas ekonomi-politik.

4. Rupiah, Inflasi, dan Kebijakan Moneter: Stabilitas yang Mahal

Salah satu tantangan paling terlihat pada 2026 adalah tekanan terhadap rupiah. Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 19–20 Mei 2026, sekaligus menaikkan Deposit Facility menjadi 4,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,00 persen. Keputusan ini dinyatakan sebagai langkah memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. ([Bank Indonesia](#))

Kebijakan moneter seperti ini menunjukkan dilema klasik negara berkembang terbuka. Bila suku bunga dipertahankan rendah, pertumbuhan kredit dapat terbantu, tetapi rupiah bisa melemah bila arus modal keluar dan permintaan dolar meningkat. Bila suku bunga dinaikkan, rupiah dapat memperoleh dukungan, tetapi biaya pinjaman bagi dunia usaha dan rumah tangga meningkat. Stabilitas kurs sering kali harus dibayar dengan pengetatan moneter.

Cadangan devisa tetap menjadi bantalan penting. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 sebesar US\$151,9 miliar, turun dari US\$154,6 miliar pada akhir Januari 2026, antara lain karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi rupiah. ([Bank Indonesia](#))

Tekanan kurs juga berkaitan dengan neraca transaksi berjalan. Pada Triwulan I 2026, Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan US\$4 miliar atau 1,09 persen dari PDB. Angka ini masih relatif terkendali, tetapi tetap menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak bisa diabaikan, terutama bila impor energi naik atau ekspor komoditas melemah. ([Reuters](#))

Inflasi Indonesia secara umum masih berada dalam koridor sasaran, tetapi tekanan harga tidak merata. Reuters melaporkan bahwa inflasi tahunan Mei 2026 diperkirakan naik mendekati 2,97 persen, dipengaruhi harga BBM nonsubsidi, tarif penerbangan, dan minyak goreng. ([Reuters](#))

Dari sudut ekonomi-politik, inflasi pangan dan energi memiliki sensitivitas lebih tinggi dibanding inflasi barang tahan lama. Kenaikan harga beras, minyak goreng, telur, transportasi, dan energi cepat dirasakan masyarakat. Bila harga kebutuhan pokok naik bersamaan dengan persepsi ketidakadilan politik, stabilitas sosial dapat terganggu. Karena itu, stabilitas harga tidak cukup dijaga melalui suku bunga; ia juga membutuhkan tata kelola pangan, distribusi logistik, energi, subsidi yang tepat sasaran, dan pengawasan pasar.

5. APBN, Defisit, dan Politik Fiskal: Antara Ekspansi dan Kredibilitas

Kebijakan fiskal adalah arena utama ekonomi-politik. Melalui APBN, negara menentukan siapa menerima apa, kapan, dan melalui mekanisme apa. Pada 2026, APBN Indonesia disusun dengan target defisit 2,68 persen terhadap PDB, dengan asumsi pertumbuhan 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen. ([InvestorTrust](#))

Secara hukum fiskal, defisit tersebut masih berada di bawah batas 3 persen PDB. Namun pasar dan publik tidak hanya melihat angka defisit. Mereka juga melihat kualitas belanja, kredibilitas penerimaan, efektivitas program prioritas, dan risiko pembiayaan. Reuters melaporkan bahwa APBN 2026 menjadi perhatian investor karena memuat peningkatan belanja, termasuk program prioritas seperti makan bergizi gratis dan pertahanan, di tengah target pertumbuhan yang lebih ambisius. ([Reuters](#))

Tantangan utama APBN bukan sekadar “berapa besar defisit,” tetapi “untuk apa defisit digunakan.” Defisit untuk infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan transformasi industri dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masa depan. Sebaliknya, defisit untuk belanja konsumtif yang tidak tepat sasaran dapat menambah beban tanpa menaikkan produktivitas.

Politik fiskal juga menghadapi dilema distribusi. Pemerintah perlu membiayai program sosial untuk menjaga daya beli dan legitimasi, tetapi juga harus menjaga ruang fiskal agar tidak menekan kepercayaan pasar. Bila belanja sosial besar tidak disertai targetting yang baik, kebocoran, atau kualitas implementasi, program yang dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas justru bisa menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola.

Salah satu isu kontemporer adalah pembentukan dan peran Danantara sebagai sovereign wealth fund baru. Reuters melaporkan bahwa Danantara dibentuk dengan rencana investasi awal US\$20 miliar pada berbagai proyek strategis, termasuk pengolahan mineral, AI, kilang, energi terbarukan, dan pangan; Presiden Prabowo menyatakan komitmen transparansi dan audit terhadap dana tersebut. ([Reuters](#))

Namun lembaga sebesar ini juga membawa tantangan tata kelola. Jika dikelola profesional, transparan, dan akuntabel, Danantara dapat menjadi instrumen transformasi industri. Jika tidak, ia dapat memunculkan risiko moral hazard, patronase, dan ketidakjelasan hubungan antara BUMN, APBN, pasar modal, dan kepentingan politik. Dengan kata lain, Danantara adalah ujian institusional: apakah Indonesia dapat membangun kapitalisme

negara yang disiplin, atau terjebak dalam kapitalisme negara yang terlalu politis.

6. Pertumbuhan 8 Persen: Ambisi, Syarat, dan Risiko

Target pertumbuhan tinggi memiliki fungsi politik dan psikologis. Ia memberi arah, memobilisasi birokrasi, dan mengirim sinyal optimisme. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan menuju 8 persen pada 2029 sebagai bagian dari ambisi menjadi negara berpendapatan tinggi. ([World Bank](#))

Namun secara ekonomi, pertumbuhan 8 persen bukan sekadar persoalan kehendak politik. Ia memerlukan lonjakan investasi produktif, peningkatan produktivitas tenaga kerja, reformasi regulasi, pendalaman sektor keuangan, kualitas pendidikan, infrastruktur, energi murah dan bersih, kepastian hukum, serta integrasi ke rantai nilai global yang bernilai tambah tinggi.

World Bank menekankan bahwa reformasi iklim usaha, stabilitas regulasi, mobilisasi modal swasta, dan peningkatan produktivitas merupakan syarat penting untuk menciptakan pekerjaan berkualitas dan mempercepat pertumbuhan. ([Open Knowledge Repository](#))

Risiko dari target tinggi muncul bila pemerintah terdorong menggunakan stimulus fiskal dan intervensi negara secara berlebihan tanpa memperbaiki produktivitas. Pertumbuhan yang dibiayai utang, subsidi, atau proyek besar yang tidak efisien dapat menghasilkan angka jangka pendek, tetapi menimbulkan beban jangka panjang. Sebaliknya, pertumbuhan yang bertumpu pada produktivitas, investasi swasta, ekspor bernilai tambah, dan inovasi akan lebih stabil.

Dalam konteks Indonesia, hilirisasi mineral menjadi contoh penting. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperkuat industri domestik. Namun hilirisasi juga menuntut listrik, teknologi,

pembiayaan, standar lingkungan, dan hubungan dagang yang sensitif. Bila hilirisasi hanya menghasilkan ekspansi ekstraktif tanpa transfer teknologi dan penciptaan pekerjaan berkualitas, manfaatnya akan terbatas.

Pertumbuhan 8 persen juga harus inklusif secara wilayah. Indonesia bukan hanya Jakarta, Jawa Barat, atau kawasan industri nikel di Sulawesi. Stabilitas nasional bergantung pada kemampuan pertumbuhan menjangkau kawasan timur, pedesaan, pesisir, perbatasan, dan kota-kota menengah. Ketimpangan wilayah dapat menjadi sumber ketidakpuasan politik bila pembangunan dianggap hanya terkonsentrasi pada elite, kota besar, atau sektor tertentu.

7. Ketenagakerjaan, Kemiskinan, dan Kualitas Pertumbuhan

Stabilitas sosial sangat bergantung pada pekerjaan. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025; jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 42,49 juta orang atau 28,78 persen dari total pekerjaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Angka pengangguran yang menurun adalah kabar baik, tetapi tidak cukup untuk menilai kualitas stabilitas. Banyak pekerjaan di Indonesia masih berada di sektor informal, berupah rendah, atau rentan terhadap perubahan harga dan permintaan. BPS mencatat rata-rata upah buruh Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kualitas pekerjaan menjadi isu strategis karena generasi muda membutuhkan mobilitas sosial. Bila lulusan pendidikan tinggi tidak memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi, atau bila pekerja muda hanya masuk ke pekerjaan informal yang tidak stabil, ketidakpuasan sosial dapat meningkat. Stabilitas politik modern sangat dipengaruhi oleh ekspektasi kelas menengah dan generasi muda.

Kemiskinan menunjukkan tren menurun. BPS mencatat persentase penduduk miskin September 2025 sebesar 8,25 persen, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin 23,36 juta orang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan juga menurun menurut indikator pengeluaran. BPS mencatat Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh kemiskinan absolut. Masyarakat membandingkan dirinya dengan kelompok lain, melihat akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan peluang digital. Ketimpangan persepsi sering kali sama kuatnya dengan ketimpangan statistik. Bila masyarakat melihat elite politik menikmati fasilitas tinggi sementara sebagian warga menghadapi tekanan biaya hidup, kemarahan sosial dapat muncul.

Reuters melaporkan bahwa protes besar pada 2025 dipicu antara lain oleh isu tunjangan perumahan anggota parlemen, persepsi korupsi, ketimpangan sosial, dan prioritas anggaran. Protes yang meluas menunjukkan bahwa stabilitas sosial tidak hanya bergantung pada indikator makro, tetapi juga pada rasa keadilan publik. ([Reuters](#))

8. Politik Kontemporer: Kekuatan Pemerintahan dan Ujian Legitimasi

Indonesia pasca-Reformasi memiliki pengalaman demokrasi elektoral yang panjang. Pemilu berlangsung berkala, pergantian kepemimpinan terjadi secara damai, partai politik berkompetisi, media relatif plural, dan masyarakat sipil tetap aktif. Freedom House menilai Indonesia telah menikmati pluralisme politik dan media serta beberapa kali pergantian kekuasaan secara damai sejak 1998. ([Freedom House](#))

Namun demokrasi tidak hanya soal pemilu. Demokrasi juga mencakup akuntabilitas, kebebasan berekspresi, independensi lembaga, perlindungan

minoritas, supremasi hukum, dan ruang kritik. Freedom House mencatat tantangan Indonesia berupa korupsi sistemik, konflik Papua, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, serta penggunaan pasal defamasi dan penodaan agama secara politis. ([Freedom House](#))

Dalam politik kontemporer, pemerintahan yang kuat dapat menjadi modal stabilitas bila digunakan untuk mempercepat keputusan dan reformasi. Namun kekuatan politik juga dapat menjadi risiko bila mengurangi checks and balances. Stabilitas yang dibangun melalui konsolidasi elite dapat tampak kokoh dalam jangka pendek, tetapi rapuh bila aspirasi publik tidak tersalurkan.

Kritik terhadap kecenderungan sentralisasi, peran negara yang lebih besar, dan ekspansi pengaruh militer dalam ranah sipil telah muncul dalam berbagai pemberitaan dan analisis. Financial Times melaporkan kekhawatiran sebagian pengamat bahwa arah politik Indonesia menunjukkan kecenderungan otoritarian, meskipun juga mencatat bahwa institusi demokrasi, masyarakat sipil, dan publik yang aktif tetap menjadi pengimbang penting. ([Financial Times](#))

Bagi stabilitas ekonomi, isu demokrasi bukan sekadar isu normatif. Investor melihat kepastian hukum, transparansi, independensi lembaga, dan kualitas pengambilan keputusan. Masyarakat melihat keadilan, ruang aspirasi, dan integritas pejabat publik. Ketika ekonomi dan demokrasi sama-sama membutuhkan kepercayaan, maka erosi salah satunya dapat melemahkan yang lain.

9. Tata Kelola, Korupsi, dan Kredibilitas Negara

Tidak ada stabilitas jangka panjang tanpa tata kelola yang kredibel. Korupsi, konflik kepentingan, birokrasi lamban, perizinan tidak pasti, dan lemahnya penegakan hukum dapat menggerus produktivitas sekaligus legitimasi politik. Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia menghadapi masalah good governance, korupsi, dan lemahnya

kinerja institusi; ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola yang kuat bagi kepercayaan investor. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan pengakuan terhadap akar masalah. Namun pengakuan harus diikuti desain institusional. Reformasi tata kelola membutuhkan transparansi anggaran, audit independen, pengadaan terbuka, perlindungan whistleblower, penguatan lembaga antikorupsi, digitalisasi birokrasi, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih.

BTI 2026 menyebut korupsi masih endemik dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia, meskipun Indonesia juga memiliki catatan penindakan terhadap sejumlah individu berpangkat tinggi dibanding beberapa negara tetangga. ([BTI 2026](#))

Dari sisi ekonomi-politik, korupsi memiliki efek ganda. Pertama, ia menaikkan biaya transaksi, sehingga investasi menjadi lebih mahal. Kedua, ia menurunkan kepercayaan publik, sehingga kebijakan yang sebenarnya baik pun bisa ditolak karena dicurigai. Ketiga, ia mengalihkan sumber daya dari sektor produktif ke rente. Keempat, ia memperlemah moral birokrasi dan menciptakan budaya kepatuhan semu.

Stabilitas Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara membangun “kepercayaan yang dapat diverifikasi.” Artinya, publik dan investor tidak cukup hanya diminta percaya; mereka harus melihat data, audit, proses, dan hasil yang transparan. Dalam konteks proyek besar, dana negara, BUMN, dan sovereign wealth fund, transparansi bukan aksesori, melainkan fondasi stabilitas.

10. Ketahanan Eksternal: Geopolitik, Komoditas, dan Rantai Pasok

Indonesia hidup dalam dunia yang semakin tidak pasti. Perang, ketegangan Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat–China, volatilitas harga energi,

fragmentasi perdagangan, dan perubahan rantai pasok global memengaruhi stabilitas domestik. Bank Indonesia pada Maret 2026 menyatakan kebijakan suku bunga dipertahankan untuk memperkuat stabilitas rupiah terhadap dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah. ([Bank Indonesia](#))

Ketergantungan Indonesia pada komoditas menjadi peluang sekaligus risiko. Sebagai eksportir besar batu bara, kelapa sawit, dan produk nikel, Indonesia mendapat manfaat ketika harga komoditas kuat. Namun ketika harga turun, permintaan melemah, atau aturan dagang berubah, penerimaan ekspor, pajak, dan investasi dapat tertekan.

Pada 2026, pemerintah bergerak menuju kebijakan pengendalian ekspor komoditas yang lebih tersentralisasi. Reuters melaporkan rencana pengelolaan ekspor komoditas melalui entitas negara/Danantara, termasuk tinjauan kontrak agar harga tidak di bawah pasar, serta kebijakan pengendalian ekspor untuk komoditas tertentu. ([Reuters](#))

Kebijakan seperti ini dapat dipahami sebagai upaya negara menangkap nilai tambah, mengurangi under-invoicing, dan memperkuat devisa. Namun ia juga membawa risiko bila mengurangi fleksibilitas bisnis, menciptakan ketidakpastian kontrak, atau menimbulkan persepsi intervensi berlebihan. Stabilitas kebijakan ekspor membutuhkan keseimbangan antara kedaulatan ekonomi dan kredibilitas pasar.

Ketahanan eksternal juga berkaitan dengan energi. Neraca perdagangan migas yang defisit menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya aman dari guncangan harga energi dunia. BPS mencatat sepanjang 2025 surplus nonmigas besar, tetapi sektor migas defisit US\$19,70 miliar; pada Januari–Maret 2026, defisit migas mencapai US\$5,08 miliar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, transisi energi, efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan pengurangan impor BBM bukan hanya agenda lingkungan, melainkan agenda stabilitas nasional.

11. Industri, Investasi, dan Produktivitas: Tantangan Struktural

Pertumbuhan stabil tidak cukup bila struktur ekonomi tidak naik kelas. Indonesia perlu memperkuat basis manufaktur, industri berbasis teknologi, agroindustri modern, ekonomi digital, jasa bernilai tinggi, serta riset dan inovasi. Namun indikator manufaktur menunjukkan adanya tekanan. S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia turun ke 49,1 pada April 2026 dari 50,1 pada Maret, menandakan kontraksi pertama dalam sembilan bulan dan penurunan kondisi manufaktur pada awal Triwulan II 2026. ([PMI](#))

Kontraksi PMI tidak berarti krisis industri, tetapi menjadi peringatan. Bila manufaktur melemah, penciptaan pekerjaan formal dan ekspor bernilai tambah dapat terganggu. Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan konsumsi, komoditas, dan belanja pemerintah untuk mencapai transformasi.

Investasi menjadi kunci. Kementerian Investasi/BKPM terus melaporkan realisasi investasi secara berkala, termasuk Triwulan I 2026. ([Badan Koordinasi Penanaman Modal](#)) Namun kualitas investasi lebih penting daripada volumenya. Investasi yang menciptakan sedikit pekerjaan, rendah transfer teknologi, atau merusak lingkungan tidak cukup untuk stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, investasi yang menciptakan rantai pasok lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong inovasi akan memperkuat basis sosial pertumbuhan.

World Bank menegaskan bahwa reformasi struktural dapat meningkatkan PDB dan pendapatan tenaga kerja secara signifikan hingga 2040, dengan potensi penciptaan jutaan pekerjaan berkualitas lebih baik bila paket reformasi dijalankan. ([World Bank](#))

Dengan demikian, agenda stabilitas harus bergeser dari “menjaga angka” ke “membangun kapasitas.” Kapasitas itu meliputi kapasitas produksi, kapasitas manusia, kapasitas institusi, kapasitas teknologi, dan kapasitas ekologis.

12. Stabilitas Sosial dan Politik Anggaran

Salah satu pelajaran penting dari ekonomi-politik adalah bahwa anggaran adalah dokumen moral sekaligus dokumen teknokratik. Ketika masyarakat membaca APBN, mereka tidak hanya melihat angka, tetapi menilai prioritas negara. Apakah negara berpihak pada pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan perlindungan kelompok rentan? Atau negara dianggap lebih berpihak pada elite, proyek besar, dan kelompok kuat?

Protes yang terjadi pada 2025 menunjukkan betapa sensitifnya politik anggaran. Reuters melaporkan bahwa demonstrasi dipicu oleh isu tunjangan anggota parlemen, persepsi korupsi, ketimpangan, serta prioritas anggaran; protes meluas ke berbagai provinsi dan menjadi ujian besar bagi pemerintahan. ([Reuters](#))

Dalam masyarakat digital, persepsi ketidakadilan menyebar cepat. Informasi tentang fasilitas pejabat, kenaikan pajak daerah, pemangkasan layanan, atau program yang gagal dapat menjadi bahan mobilisasi publik. Pemerintah tidak lagi bisa mengelola stabilitas hanya melalui komunikasi satu arah. Diperlukan dialog, transparansi data, dan respons kebijakan yang cepat.

Program sosial besar seperti makan bergizi gratis dapat memperkuat stabilitas bila berhasil meningkatkan gizi, pendidikan, ekonomi lokal, dan rasa kehadiran negara. Namun program besar juga dapat menjadi sumber kritik bila kualitas implementasi lemah, pengadaan tidak transparan, atau manfaatnya tidak tepat sasaran. Di sinilah tata kelola bertemu stabilitas sosial.

13. Demokrasi Digital, Disinformasi, dan Stabilitas

Stabilitas politik kontemporer sangat dipengaruhi ruang digital. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, memperluas partisipasi publik,

tetapi juga membuka ruang disinformasi, polarisasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini. Freedom House dalam laporan Freedom on the Net 2025 tetap mencatat Indonesia sebagai negara dengan pluralisme politik dan media yang signifikan, tetapi juga menghadapi tantangan korupsi, konflik Papua, diskriminasi, serta penggunaan hukum defamasi dan penodaan agama secara politis. ([Freedom House](#))

Dalam konteks ekonomi, disinformasi dapat memengaruhi perilaku pasar. Rumor tentang bank, kurs, kebijakan pajak, atau subsidi dapat memicu kepanikan. Dalam konteks politik, informasi yang salah dapat memperluas kemarahan sosial. Karena itu, literasi digital, transparansi komunikasi pemerintah, dan kebebasan pers yang bertanggung jawab menjadi bagian dari infrastruktur stabilitas.

Namun respons terhadap disinformasi harus hati-hati. Bila negara menggunakan isu disinformasi untuk membatasi kritik sah, stabilitas demokratis dapat melemah. Membedakan kritik, satire, disinformasi, dan provokasi kekerasan adalah tantangan besar dalam tata kelola digital.

14. Stabilitas Daerah: Desentralisasi, Ketimpangan, dan Kapasitas Lokal

Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan keragaman wilayah ekstrem. Stabilitas nasional tidak mungkin dicapai bila stabilitas daerah rapuh. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk mengelola kebutuhan lokal, tetapi juga menciptakan variasi kapasitas fiskal, birokrasi, dan tata kelola.

Tantangan daerah mencakup ketimpangan pendapatan, kualitas layanan publik, kapasitas pajak daerah, konflik lahan, kerusakan lingkungan, serta ketergantungan pada transfer pusat. Ketika transfer daerah berubah atau dipersepsikan tidak adil, ketegangan politik lokal dapat muncul.

Dalam konteks pembangunan, Jawa tetap menjadi pusat ekonomi, sementara wilayah timur, pesisir, dan kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda. Stabilitas di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan tidak cukup dipahami melalui angka PDB; ia harus dilihat melalui akses tanah, identitas, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan rasa keadilan.

Kebijakan nasional seperti hilirisasi, perkebunan, tambang, IKN, dan proyek energi harus dikelola dengan prinsip keadilan ekologis dan sosial. Jika tidak, investasi yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dapat memicu konflik lokal.

15. Skenario Stabilitas Indonesia 2026–2030

Secara analitis, Indonesia dapat menghadapi tiga skenario.

Skenario pertama: stabilitas transformatif

Dalam skenario ini, pemerintah menjaga disiplin fiskal, memperkuat independensi kebijakan moneter, memperbaiki tata kelola Danantara dan BUMN, mempercepat reformasi regulasi, menurunkan biaya logistik, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, serta memperluas pekerjaan formal. Pertumbuhan naik bertahap ke atas 5,5 persen, inflasi terkendali, rupiah stabil, investasi meningkat, dan legitimasi sosial membaik.

Skenario kedua: stabilitas semu

Dalam skenario ini, angka makro tetap terlihat baik, tetapi pertumbuhan bergantung pada belanja pemerintah, komoditas, dan konsumsi. Reformasi kelembagaan lambat, korupsi tetap tinggi, pekerjaan berkualitas terbatas, dan ketidakpuasan sosial sesekali muncul. Stabilitas tampak terjaga, tetapi rentan terhadap guncangan eksternal seperti harga minyak, arus modal keluar, atau gejolak politik.

Skenario ketiga: instabilitas akumulatif

Dalam skenario ini, tekanan kurs, defisit fiskal, inflasi pangan, pelemahan manufaktur, ketidakpastian regulasi, dan protes sosial saling memperkuat. Kepercayaan pasar melemah, biaya pembiayaan naik, kebijakan menjadi reaktif, dan ruang demokrasi menyempit. Skenario ini bukan prediksi, tetapi peringatan bahwa stabilitas dapat melemah bila masalah ekonomi dan politik diperlakukan secara terpisah.

16. Agenda Kebijakan: Membangun Stabilitas yang Produktif dan Inklusif

Pertama, Indonesia perlu menjaga kredibilitas fiskal. Batas defisit 3 persen dan rasio utang yang sehat bukan sekadar angka teknis, melainkan sinyal disiplin. Namun disiplin fiskal harus disertai kualitas belanja. Program sosial besar perlu dievaluasi dengan indikator hasil, bukan hanya serapan anggaran.

Kedua, stabilitas moneter harus ditopang stabilitas struktural. BI dapat menjaga rupiah melalui suku bunga dan intervensi, tetapi stabilitas rupiah jangka panjang membutuhkan ekspor bernilai tambah, impor energi lebih rendah, kepastian fiskal, dan kepercayaan investor.

Ketiga, reformasi tata kelola harus menjadi agenda pusat. Danantara, BUMN, proyek strategis, dan pengadaan publik perlu standar audit, transparansi, dan akuntabilitas tinggi. Investor dan publik membutuhkan bukti, bukan hanya janji.

Keempat, pertumbuhan harus diarahkan pada pekerjaan berkualitas. Kebijakan industri harus terhubung dengan pendidikan vokasi, universitas, riset, UMKM, dan rantai pasok lokal. Hilirisasi harus menghasilkan keterampilan, teknologi, dan pekerjaan formal.

Kelima, stabilitas sosial membutuhkan kebijakan pangan dan energi yang kuat. Inflasi pangan harus dikelola dari hulu ke hilir: produksi, stok,

distribusi, logistik, data, dan pengawasan pasar. Energi perlu diarahkan pada efisiensi, energi terbarukan, dan pengurangan impor BBM.

Keenam, demokrasi harus dipahami sebagai aset stabilitas. Kritik publik, media bebas, masyarakat sipil, dan oposisi bukan gangguan, melainkan mekanisme koreksi. Negara yang terlalu menekan kritik mungkin tampak stabil sementara, tetapi kehilangan sensor dini terhadap kesalahan kebijakan.

Ketujuh, desentralisasi perlu diperkuat dengan kapasitas daerah. Pemerintah pusat harus menjaga koordinasi, tetapi daerah perlu ruang, data, dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah lokal. Stabilitas nasional lahir dari stabilitas daerah.

Kedelapan, literasi digital dan komunikasi publik perlu ditingkatkan. Pemerintah harus menyampaikan data secara terbuka, menjelaskan alasan kebijakan, mengakui risiko, dan melibatkan publik. Dalam era digital, stabilitas tidak bisa dibangun dengan menutup informasi, melainkan dengan membangun kepercayaan informasi.

17. Refleksi Penutup: Stabilitas sebagai Kepercayaan yang Dikelola

Indonesia kontemporer bukan negara rapuh, tetapi juga bukan negara tanpa risiko. Ekonomi masih tumbuh, inflasi relatif terkendali, kemiskinan dan pengangguran menurun, dan pasar domestik tetap besar. Namun tantangan stabilitas semakin kompleks karena tekanan ekonomi, politik, sosial, dan kelembagaan saling terkait.

Pelajaran utama makalah ini adalah bahwa stabilitas tidak boleh dipahami sebagai status quo. Stabilitas yang hanya menjaga ketenangan tanpa reformasi dapat berubah menjadi stagnasi. Sebaliknya, reformasi yang terlalu agresif tanpa tata kelola dapat memicu ketidakpastian. Indonesia membutuhkan keseimbangan: berani berubah, tetapi tetap disiplin; kuat memimpin, tetapi tetap akuntabel; ambisius bertumbuh, tetapi tetap

inklusif; terbuka terhadap pasar, tetapi tetap menjaga kedaulatan; menjaga ketertiban, tetapi tetap menghormati demokrasi.

Stabilitas sejati adalah kepercayaan yang dikelola. Kepercayaan masyarakat lahir dari keadilan dan pelayanan publik. Kepercayaan investor lahir dari kepastian dan konsistensi. Kepercayaan daerah lahir dari pemerataan dan penghormatan terhadap konteks lokal. Kepercayaan generasi muda lahir dari kesempatan kerja, pendidikan, dan ruang partisipasi. Kepercayaan internasional lahir dari tata kelola, komitmen aturan, dan kredibilitas kebijakan.

Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan hanya menghindari krisis, tetapi membangun stabilitas yang produktif, demokratis, dan berkelanjutan. Inilah inti ekonomi-politik kontemporer Indonesia: menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan, kebebasan, dan kapasitas negara.

Glosarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, subsidi, dan program sosial.

BI-Rate

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan stance kebijakan moneter, memengaruhi suku bunga pasar, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi.

Cadangan devisa

Aset valuta asing yang dikelola bank sentral untuk membiayai kebutuhan eksternal dan menstabilkan nilai tukar.

Defisit fiskal

Keadaan ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu periode anggaran.

Defisit transaksi berjalan

Kondisi ketika pembayaran luar negeri untuk barang, jasa, pendapatan primer, dan transfer lebih besar daripada penerimaannya.

Demokrasi elektoral

Sistem politik yang ditandai pemilu berkala dan kompetisi politik, tetapi belum tentu menjamin kualitas akuntabilitas, kebebasan sipil, dan supremasi hukum.

Disinformasi

Informasi salah yang disebar dengan sengaja untuk memengaruhi opini atau perilaku publik.

Gini Ratio

Indikator ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; angka mendekati 0 menunjukkan lebih merata, mendekati 1 menunjukkan lebih timpang.

Good governance

Tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kepastian hukum, partisipasi, dan pengendalian korupsi.

Hilirisasi

Strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan domestik sebelum diekspor atau digunakan industri lanjut.

Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode.

Instabilitas akumulatif

Kondisi ketika berbagai tekanan ekonomi, politik, dan sosial saling memperkuat sehingga meningkatkan risiko krisis.

Kebijakan fiskal

Kebijakan pemerintah melalui pajak, belanja, subsidi, dan pembiayaan untuk memengaruhi perekonomian.

Kebijakan moneter

Kebijakan bank sentral untuk mengelola suku bunga, likuiditas, inflasi, dan nilai tukar.

Ketahanan eksternal

Kemampuan ekonomi menghadapi guncangan dari luar negeri, seperti volatilitas harga komoditas, arus modal, perang, atau perubahan suku bunga global.

Legitimasi politik

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah dan kebijakan yang dijalkannya.

Middle-income trap

Kondisi ketika negara berpendapatan menengah sulit naik menjadi negara berpendapatan tinggi karena produktivitas, inovasi, dan institusi tidak berkembang cukup cepat.

Neraca perdagangan

Selisih antara nilai ekspor dan impor barang suatu negara.

PMI Manufaktur

Purchasing Managers' Index; indikator kondisi sektor manufaktur. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi, di bawah 50 menunjukkan kontraksi.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih bernilai dengan input tertentu.

Rupiah stability

Stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS, yang penting bagi inflasi, impor, utang, dan kepercayaan pasar.

Sovereign wealth fund

Dana investasi milik negara yang mengelola aset publik untuk tujuan strategis, pembangunan, atau imbal hasil jangka panjang.

Stabilitas dinamis

Kemampuan sistem mempertahankan ketertiban sambil beradaptasi dan melakukan transformasi.

Stabilitas fiskal

Kemampuan negara menjaga anggaran, defisit, utang, dan pembiayaan dalam batas yang kredibel dan berkelanjutan.

Stabilitas sosial

Keadaan ketika masyarakat memiliki rasa aman, akses kebutuhan dasar, peluang ekonomi, dan mekanisme penyelesaian konflik yang memadai.

Daftar Pustaka (APA 7)

Asian Development Bank. (2026). *Asian Development Outlook April 2026: Indonesia economy outlook*. ([Asian Development Bank](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Exports and imports of Indonesia in December 2025*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *In September 2025, the percentage of the poor population decreased to 8.25 percent*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *The Gini Ratio in September 2025 was 0.363*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, May 4). *Exports and imports of Indonesia in March 2026*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, May 5). *Indonesia's economic growth in Q1-2026 was 5.61 percent year-on-year.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, May 5). *Unemployment rate was 4.68 percent and the average wage of employees was 3.29 million rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, March 6). *Official reserve assets in February 2026 remained high.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, May 20). *BI-Rate increased by 50 bps to 5.25%: Strengthening stability, supporting economic growth.* ([Bank Indonesia](#))

Freedom House. (2025). *Indonesia: Freedom in the World 2025 country report.* ([Freedom House](#))

Freedom House. (2025). *Indonesia: Freedom on the Net 2025 country report.* ([Freedom House](#))

International Monetary Fund. (2026, January 21). *IMF Executive Board concludes 2025 Article IV Consultation with Indonesia.* ([IMF](#))

OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024.* ([OECD](#))

Reuters. (2025, September 2). *What's fuelling the rage in Indonesia?* ([Reuters](#))

Reuters. (2025, September 23). *Indonesia parliament passes Prabowo's 2026 budget.* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, May 20). *Indonesia unveils ambitious targets, tightens commodities grip in pursuit of "magnificent prosperity".* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, May 22). *Indonesia's Q1 current account deficit at 1.09% of GDP.* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, May 25). *Indonesia to revise state budget law but deficit ceiling not the focus, lawmaker says.* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, May 29). *Indonesia inflation seen picking up to 2.97% in May.* ([Reuters](#))

S&P Global. (2026, May). *Indonesia Manufacturing PMI: April 2026.* ([PMI](#))

World Bank. (2025, December). *Indonesia Economic Prospects: December 2025.* ([Open Knowledge Repository](#))

World Bank. (2026). *Indonesia Growth and Jobs Report: Running faster, for longer.* ([World Bank](#))

World Bank. (2026). *Indonesia country overview.* ([World Bank](#))

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 31 Mei 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a1b80c4-79a0-83ec-bf83-dcec2b14c16f>